

Judul : Penyaluran gas subsidi, komisi XII sarankan pakai data akurat
Tanggal : Minggu, 16 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penyaluran Gas Subsidi Komisi XII Sarankan Pakai Data Akurat



Dewi Yustisiana

ANGGOTA Komisi XII DPR Dewi Yustisiana mengatakan, integrasi data kependudukan akan membantu Pemerintah memetakan kebutuhan elpiji 3 kg atau gas melong secara lebih tepat. Pemerintah juga dapat mengurangi potensi penyimpangan sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran subsidi energi.

"Data yang akurat menjadi fondasi utama agar kebijakan subsidi dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tandas Dewi di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menggandeng Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat penyaluran subsidi elpiji 3 kg dengan memanfaatkan data kependudukan pada Senin (10/8/2026). Kerja sama tersebut memungkinkan perseroan memanfaatkan data NIK dalam proses verifikasi dan validasi masyarakat yang layak mendapatkan subsidi.

Pemanfaatan data kependudukan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG.

Dewi melanjutkan, pemanfaatan data bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi untuk memastikan negara hadir melindungi mereka yang benar-benar membutuhkan. Rumah tangga kurang mampu, pelaku usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran tetap memperoleh akses elpiji 3 kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan.

Namun, Dewi mengingatkan, integrasi data perlu disertai perlindungan data pribadi, keamanan sistem, serta pembatasan akses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem yang dibangun juga harus mampu memperbarui data secara berkala agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera diakomodasi.

Selain itu, ia mendorong agar penerapannya dilakukan secara bertahap dan didahului sosialisasi yang luas. Pemerintah dan Pertamina juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang mudah dijangkau agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses akibat ketidaksesuaian data.

"Komisi XII DPR akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaannya agar penyaluran elpiji 3 kg semakin tepat sasaran tanpa mengurangi ketersediaan dan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan," kata politisi Golkar ini.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi data demi mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Juga memperkuat tata kelola penyaluran subsidi demi menjaga pelayanan energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. ■ TIF